

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama bagi perempuan yang masih mengalami kemiskinan dengan disebabkan oleh banyaknya kesulitan terutama dalam mengakses layanan dasar. Data pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kesenjangan yaitu (IPM) laki-laki statusnya lebih tinggi (76,73) sementara IPM perempuan statusnya sedang (70,31). adapun IPM Perempuan berkontribusi terhadap status IPM Indonesia yang berada di ranking 17 dari seluruh negara G20.

Sedangkan Indeks Kesetaraan Gender (IPG) mengalami kenaikan namun tidak signifikan karena selama 10 tahun ini naik dari 89,52 menjadi 91,63 dan tetap ada diranking 9 dari 10 negara ASEAN dan ranking 16 dari negara G20. Sama halnya dengan data global Indeks Gender SDGs EM2030 bahwa indeks kesetaraan gender di Indonesia juga tergolong “buruk”, jika dibandingkan dengan negara dengan posisi sama Indonesia adalah penyumbang sejumlah 3 (tiga) miliar anak perempuan dan perempuan berada pada kondisi kesetaraan gender yang ‘buruk’ atau ‘sangat buruk’ di dunia.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menunjukkan salah satu kasus tentang praktik perkawinan anak masih tinggi terutama di desa-desa bahkan di beberapa tempat masih terjadi secara ekstrim terutama perkawinan anak perempuan di usia 10 atau 12 tahun. Data Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipublikasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia tahun 2024 menunjukkan disetiap 4 (empat) perempuan terjadi 1 kasus perempuan mengalami kekerasan diusia 15-64 tahun dalam bentuk kekerasan fisik, dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup mereka. Sedangkan menurut untuk jumlah pengaduan tahun 2022 ada peningkatan kejadian sebanyak dua kali lipat dari tahun 2021 yaitu 1.010 kasus menjadi 2.346 kasus. Begitu pula dengan parameter lainnya seperti Angka Kematian Ibu (AKI), meskipun menurun menjadi 183 per 100 ribu kelahiran hidup namun masih jauh dari target target SDGs 2030.

Jika ditelaah dari data diatas, dapat dikatakan bahwa penyebab ketidakadilan yang dialami oleh perempuan bukan hanya karena faktor tunggal, melainkan karena adanya persilangan berbagai identitas seperti gender, kelas sosial, ras, pendidikan, status perkawinan atau kondisi ekonomi. Konsep ini diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw (1989) dan menekankan bahwa diskriminasi ini bekerja secara simultan dan saling memperkuat. Dalam konteks pembangunan perempuan yang mengalami identitas berlapis sering menghadapi hambatan struktural dalam mengakses sumber daya, ruang partisipasi serta perlindungan sosial pemerintah. Hal ini sejalan dengan kerangka pemberdayaan N.Kabeer (1999) bahwa keterbatasan sumber daya akan mempengaruhi agensi perempuan dalam mengakses kesejahteraan perempuan.

Banyak upaya untuk mengatasi masalah-masalah perempuan berbasis gender ini, terutama yang dilakukan oleh organisasi – organisasi perempuan di Indonesia melalui beragam strategi yang melibatkan kelompok sasaran di seluruh lapisan. Kontribusi dan peran penting

gerakan yang dilakukan oleh organisasi – organisasi perempuan di Indonesia dari masa ke masa tidak dapat dianggap kecil. Sejarah mencatat GERWANI berdiri tahun 1950 sebagai salah satu organisasi yang bekerja dengan perempuan akar rumput perdesaan dan mempunyai visi untuk mengusung agenda feminis serta nasionalis melalui pendidikan perempuan akar rumput dan memperkuat pengorganisasian untuk mendorong adanya kebijakan publik seperti Undang – Undang Perkawinan, yang dianggap tidak adil pada perempuan. (Adiwilaga, 2016) melalui penelitiannya memaparkan misi gerakan Aisyiyah tentang hak seksualitas juga menjadi keberpihakan oleh organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia, dalam perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi Pada Pimpinan Pusat Nasyiatul ‘Aisyiyah Periode 2012-2016) “Menjelaskan pada dasarnya, Nasyiatul Aisyiyah menyikapi feminisme sebagai sebuah paham yang memiliki hal-hal positif yang sejalan dengan dasar perjuangan Nasyiatul Aisyiyah itu sendiri. Contohnya adalah kemandirian perempuan yang menjadi dasar utama perjuangan Nasyiatul Aisyiyah, juga merupakan inti perjuangan yang diperjuangkan oleh feminisme. Selain itu, adanya usaha untuk memperbaiki ketimpangan gender, kesadaran pendidikan bagi perempuan, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Nasyiatul Aisyiyah pada dasarnya memiliki sinkronisasi dengan wujud budaya perempuan Indonesia yang mandiri, kreatif & inovatif, memiliki jiwa pemimpin, bebas nilai, dan berpedoman pada agama”. Gerakan-gerakan perempuan di Indonesia yang memiliki keberagaman bentuk secara organisasi, strategi maupun kepentingannya berhasil mendorong adanya perubahan dalam beberapa aspek pembangunan gender terutama dalam pemenuhan hak-hak perempuan. Seperti keberhasilan gerakan perempuan dalam mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bukti bahwa gerakan perempuan menunjukkan adanya kemampuan mempengaruhi para pembuat kebijakan di DPR RI melalui agenda-agenda feminisme (Sya’rani, 2020).

Sedangkan model gerakan perempuan lain seperti peran PKK dan kelompok perempuan ibu rumah tangga mendukung program pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kota Ambon yang mengambil studi kasus kelompok perempuan yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan kuliner di Negeri Passo, Negeri hutumuri dan Negeri Rutong. Kelompok ini berfokus pada bidang kuliner yang mengelola produk hasil dari Negeri Rutong seperti sagu, buah tomat, nanas dan ikan. peran PKK (Fienkan Laura Sandyego Dimalang dan Bakti Setiawan, 2022).

Namun dalam perjalanannya, organisasi perempuan di Indonesia mendapatkan tantangan yang berasal dari eksternal yang menganggap gerakan organisasi perempuan mengganggu otoritasnya. adanya peristiwa gerakan 30 September 1965 adalah salah satu situasi politik yang sangat berpengaruh pada nasib tragis dari gerakan ini hingga dinyatakan sebagai gerakan terlarang dan dibubarkan pada tahun 1966. Bubarnya GERWANI sebagai representatif gerakan perempuan berbasis akar rumput yang besar dan progresif, mendorong rezim orde baru untuk melakukan kontrol terhadap seluruh gerakan-gerakan perempuan di Indonesia. Seperti diketahui pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sangat dekat dengan militer, rejim orde baru memiliki ciri “penegakan dan sentralisasi kekuasaan otoriter melalui kekuatan militer, penguasaan negara oleh pejabatnya, serta tidak diikutsertakannya partai politik dalam pengambilan keputusan (Muchtari, 2016).

Cara-cara negara mengontrol dan memobilisasi gerakan perempuan untuk kepentingan negara dan penguasa melalui ideologi, tujuan organisasi, sistem rekrutmen keanggotaannya,

struktur kepangkatan organisasi, jenis kegiatan dan lain-lain (Fatimah, 2021). Seperti yang dilakukan pemerintah orde baru pada organisasi PKK yang terstruktur sampai di perdesaan. Peranan PKK tentang konstruksi sosial keperempuanan orde baru yang memperdalam peran penting PKK yang digunakan sebagai lembaga perantara tunggal antara negara dengan kaum perempuan desa, sehingga kekuasaan negara dapat dihubungkan melalui berbagai pengaruh yaitu sosial, budaya, ideologi, politik dan ekonomi (Julia Suryakusuma, 2011).

Organisasi perempuan yang mengusung agenda perjuangan feminis juga menghadapi tantangan dari kelompok konservatif dan fundamentalisme agama yang berasumsi bahwa gerakan feminis mengajarkan ketidakbaikan bagi perempuan, selaras dengan penelitian (Miftahudin Azmi et al., 2019) tentang fenomena gerakan Indonesia tanpa feminisme di media massa menjelaskan peneguhan ideologi anti feminisme melalui media sosial yang dilakukan oleh kelompok anti feminisme di Indonesia sebagai bentuk wacana baru dengan memaksakan kembali konsep atas nama keberagaman Islam konservatif yang tidak sesuai dengan keragaman agama dan budaya di Indonesia. Sedangkan anggapan dualisme terhadap gerakan feminis dinilai oleh kelompok fundamentalisme Islam dengan menyatakan bahwa gerakan ini tidak cocok di Indonesia dengan membawa keburukan dengan asumsi menyalahi kodrat perempuan yang seharusnya laki-laki saja yang menjadi pemimpin (Hendra, 2021), sedangkan penelitian lain menyimpulkan bahwa betapa kuatnya paham Islam garis keras ketika mencuci pikiran para perempuan yang memiliki latar belakang kesulitan tentang kondisi ekonomi dan terpinggirkan secara sosial menjadi aktivis teroris dan pelaku bom bunuh diri dengan suka rela (Nuraniyah, 2018). Pengalaman perempuan yang bergabung pada Negara Islam (ISIS) ini diulas dalam jurnal yang berjudul *“Not Just Brainwashed: Understanding The Radicalization Of Indonesian Female Supporters Of The Islamic State”* dikuatkan pula dengan penelitian tentang feminisme memberikan kebebasan perempuan dalam ranah berpikir secara filosofi yang menjelaskan pemahaman tentang masih perlunya batasan-batasan kebebasan yang dapat diatur, dan kebebasan yang mutlak dimiliki para perempuan (Ilaa, 2021).

Menurut penelitian lain yang mengungkapkan umumnya budaya menjadi hambatan utama bagi kuota gender untuk benar-benar meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih (Hilman et al., 2017). Di Indonesia, budaya masih menjadi rintangan bagi partisipasi perempuan di politik terpilih, tetapi perubahan dalam cara pemilihan dan dampaknya terhadap dana kampanye menjadi masalah yang lebih besar bagi kemajuan perempuan dalam politik partai dan parlemen. Padahal gerakan organisasi perempuan telah berkontribusi mendorong keterwakilan perempuan melalui kuota gender yang tidak mudah bagi perempuan untuk ikut kontestasi politik praktis di Indonesia. Meskipun kuota gender dianggap dapat meningkatkan representasi perempuan di parlemen, hasilnya sangat berbeda di antara negara dan wilayah. Adapun salah satu penyebab mengapa masih sulit perempuan berdaya di ranah publik adalah berkaitan dengan rendahnya kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan (Samarakoon et al., 2017) bahwa pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan memang mampu menurunkan jumlah kelahiran anak dengan merencanakan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi, tetapi pendidikan tidak secara signifikan meningkatkan otoritas perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga, kepemilikan aset, atau partisipasi dalam kehidupan masyarakat, kecuali untuk beberapa ukuran hasil. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan membantu memberdayakan perempuan di negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia. Selaras dengan ini dalam laporan penelitian Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender

Indonesia 2045, tentang *scenario building* atas kondisi kesetaraan gender di Indonesia dan peta jalan pencapaian tingkat kesetaraan gender di Indonesia selama 20 tahun mendatang, menemukan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan perlu menyelesaikan beberapa persoalan mendasar untuk mewujudkan agenda kesetaraan gender, tantangan tersebut adalah permasalahan yang mendasar yaitu dari dimensi sosial-budaya (*gender role beliefs*) dan Dan dimensi kebijakan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan responsif gender tidak akan optimal jika kondisi sosial budaya masyarakat masih konservatif dan moderat. (Virgianita et al., 2021).

Mengapa organisasi perempuan yang menggunakan perspektif feminis cenderung mendapatkan sorotan, hal ini dikarenakan menuntut ada perubahan pola pikir yang kritis pada perempuan sehingga berpengaruh pada pola kepemimpinan didalam organisasi perempuan. Misi organisasi yang mendorong adanya perubahan pola pikir kritis tentang kepemimpinan perempuan, sedangkan penelitian lain menjelaskan bagaimana gender dan struktur kekuasaan mempengaruhi cara perempuan memimpin, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh mereka dalam lingkup kepemimpinan (Da Meisa, E. A, & Anzari, P. P, 2021). Pentingnya kesetaraan gender dalam kepemimpinan, feminisme menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kepemimpinan begitu pula meletakkan pentingnya pengalaman perempuan mendorong kepemimpinan perempuan melalui praktik kepemimpinan yang lebih inklusif terhadap perempuan (Fadhillah et al., 2023). Keuntungan kepemimpinan perempuan yang berperspektif feminis ini juga dipaparkan oleh penelitian berikutnya (tentang dampaknya kepemimpinan perempuan pada aspek di masyarakat, organisasi dan politik (A Fitriana dan C Cenni, 2021), hal serupa juga disampaikan dalam jurnal "Kepemimpinan Perempuan Di Era Globalisasi" menjelaskan bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan sangat penting dan relevan dalam bentuk globalisasi. Hal ini menekankan perlunya mengakui kontribusi perempuan dalam berbagai bidang kepemimpinan di tengah dinamika globalisasi yang semakin canggih (Hartono, R, 2021).

Melalui isu kepemimpinan perempuan yang dipromosikan oleh organisasi perempuan, menurut dalam jurnal berjudul "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam" dipengaruhi oleh latar belakang identitas, pengalaman hidup, budaya, seperti penjelasannya dalam ajaran Islam sebenarnya perempuan memiliki potensi dan hak untuk berperan dalam kepemimpinan, baik dalam sosial, politik, maupun spiritual (Haris, M, 2017). Meskipun terdapat variasi dalam memahami dan praktiknya, konsep ini menunjukkan bahwa Islam mengakui peran serta perempuan dalam memimpin dan berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama, temuan penelitian ini diperkuat dengan tipologi kepemimpinan perempuan Aceh tentang kepemimpinan perempuan Aceh yang dipengaruhi oleh budaya Aceh yang mayoritas Islam. Didukung pula oleh penelitian yang memperkuat pernyataan bahwa gaya kepemimpinan perempuan yang dipengaruhi oleh peran gender akan berdampak pada budaya dalam suatu organisasi(Nizomi, K, 2019) .

Sedangkan gerakan perempuan yang berbasis komunitas akar rumput, pada studi lain juga meneliti ada kaitan antara organisasi perempuan terutama yang bekerja dengan perempuan akar rumput mendorong adanya efektifitas kepemimpinan perempuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan perempuan yang dilakukan seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang menyatakan untuk mencapai kepemimpinan yang efektif, penting mengoptimalkan peran dan kontribusi perempuan melalui pemberdayaan mereka secara

menyeluruh dalam berbagai bidang dan tingkatan kepemimpinan (Aripurnami S, 2018). Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *working paper* yang berjudul *It is only women' to 'it is women': A process model for how poor women gained legitimacy as economic and social actors through a grass root social innovation* menjelaskan bahwa meningkatnya kesenjangan sosial di seluruh dunia telah mendorong para pakar organisasi untuk membayar peningkatan perhatian pada organisasi inovatif secara sosial yang mengatasi masalah kesenjangan dan pengasingan sosial (Simy Joy dan Priya Nair Rajeev, 2017). Penelitian ini melihat adanya partisipasi penerima manfaat dari komunitas *Kudumbashree* yaitu Organisasi Berbasis akar rumput (KS CBO), sebuah inisiatif pengentasan kemiskinan dimulai di Kerala, India pada tahun 1998, dan menyajikan model empiris untuk menunjukkan pergeseran progresif dalam referensial keyakinan tentang perempuan miskin menghasilkan legitimasi yang lebih besar bagi mereka secara sosial, ekonomi dan aktor politik. Model pemberdayaan perempuan akar rumput juga pada penelitian lainnya menunjukkan bahwa Pendidikan Adil Gender di komunitas akar rumput mampu melawan kemiskinan perempuan yang dialami oleh perempuan akar rumput di organisasi perempuan Sekolah Perempuan Gresik, pemberdayaan yang memanfaatkan potensi masyarakat lokal (Fahmi dkk, 2023).

Kepemimpinan perempuan dewasa ini menunjukkan kemajuan secara konseptual, namun bias normatif tentang 'siapa yang pantas memimpin' tetap menggantal, terutama pada ranah akar rumput. Pembaruan atas kesesuaian peran (*role congruity*) menegaskan bahwa stereotip gender terus membatasi akses dan pengakuan (*recognition*) terhadap perempuan sebagai pemimpin strategis, meski wacana kepemimpinan inklusif kian dominan di tingkat global (Triana, Kim, & Park, 2024). Di sini tampak kesenjangan (*gap*) antara idealitas (retorika kesetaraan) dan realitas (stigma dan hambatan struktural)—terutama bagi pemimpin perempuan yang bekerja di komunitas lokal, bukan di organisasi besar yang sering menjadi fokus studi kepemimpinan arus utama.

Pengakuan (*recognition*) memberikan lensa kritis untuk membaca mengapa pemberdayaan kerap tersendat. Ketiadaan pengakuan (*misrecognition*) atas kapasitas, kontribusi, dan martabat menggerus kepercayaan diri dan agensi perempuan, sehingga program pemberdayaan (*empowerment*) yang teknokratis sering tidak berbuah perubahan relasional dan institusional (Waelen, 2022). Kajian feminis terkini juga menunjukkan bahwa invisibilisasi kepedulian (*care*) menghasilkan bentuk-bentuk ketidakadilan yang tidak bisa diatasi hanya dengan pelatihan atau akses ekonomi tanpa pergeseran pengakuan sosial (Wimbauer, Motakef, & Langer, 2023). Inilah celah yang relevan dengan isu dalam tulisan ini, di mana kepemimpinan perempuan di akar rumput menegosiasikan pengakuan di tengah norma yang menempatkan perempuan sebagai *second line*.

Di Indonesia, banyak terlihat adanya paradoksal. Pada satu sisi terdapat peningkatan inisiatif dan partisipasi perempuan; di sisi lain, norma patriarkal dan rezim feminitas hegemonik masih kuat, termasuk dalam sektor pendidikan dan komunitas religius. Riset di Asia Selatan dan Indonesia menunjukkan hambatan personal, sosial, dan organisasi yang saling menumpuk dalam lintasan karier kepemimpinan perempuan (Islam, Jantan, & Harun, 2023). Pada saat yang sama, pemimpin perempuan di Indonesia kerap harus menegosiasikan feminitas ideal agar kepemimpinannya diterima (Zahra, 2024). Realitas ini menunjukkan perbedaan antara capaian kuantitatif (partisipasi) dan kualitas pengakuan (legitimasi) terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat institusi dan komunitas.

Pada bidang pendidikan, kajian Harris (2024) menyoroti *invisibility* pemimpin Perempuan, di mana kontribusinya sering tak terlihat dalam narasi arus utama kepemimpinan/organisasi. Sementara itu, telaah sistematis menegaskan bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam gerakan sosial dan perubahan normatif di komunitas, tetapi studi yang secara eksplisit menghubungkan kepemimpinan akar rumput dengan penguatan pengakuan (bukan sekadar *outcome* program) di sekolah/komunitas perempuan masih jarang (Aulia, Setiawan, & Rahayu, 2024). Dengan demikian, ada celah tematik-metodologis: kebutuhan studi kualitatif kontekstual yang memfokuskan proses pengakuan (relasional, simbolik, dan institusional) dalam ruang pendidikan komunitas seperti Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik.

Intervensi pemberdayaan yang terdokumentasi secara global cenderung menitikberatkan pada desain program (*training*, akses sumber daya, partisipasi formal) dan indikator hasil jangka pendek. Padahal, bukti di *setting* berketimpangan tinggi menunjukkan bahwa transformasi norma dan arsitektur pengakuan sosial adalah prasyarat strategis jangka panjang (Murthy, 2022). Karena itu, perlu pendekatan yang menggabungkan pemberdayaan dengan pergeseran norma dan relasi kuasa di tingkat local, di wilayah kerja kepemimpinan perempuan akar rumput. Kebijakan-praktik ini membuka ruang kontribusi empiris: menelaah bagaimana pemimpin perempuan di Gresik merancang strategi pengakuan (*recognition strategies*) untuk menandingi stigmatisasi dan meneguhkan keberdayaan kolektif.

Konteks keislaman di Indonesia menambah lapisan penting. Praktik dan otoritas religius lokal dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus arena kontestasi. Bukti Indonesia terkini menunjukkan pola-pola pemberdayaan yang berakar pada tradisi keagamaan serta negosiasi otoritas dalam institusi pendidikan/komunitas (Pakuna et al., 2024). Namun, studi empiris yang mengaitkan kepemimpinan perempuan akar rumput di sekolah perempuan, penguatan pengakuan, dan perlawanan stigma masih minim. Artikel ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan memusatkan perhatian pada proses-proses kepemimpinan yang memproduksi pengakuan melalui bahasa, praktik organisasi, dan jejaring di Sekolah Perempuan Gresik, serta menjelaskan bagaimana strategi itu mendorong keberdayaan sekaligus meruntuhkan stigma *second line*.

Dari ulasan di atas, peneliti menemukan masalah tentang minimnya pengakuan terhadap kepemimpinan akar rumput yang ditunjukkan dengan masih adanya stigma negatif yang dilekatkan tidak hanya pada perempuan pemimpin akar rumput secara individu namun juga pada organisasi perempuan yang berbasis akar rumput hingga saat ini. Sedangkan pada komunitas perempuan akar rumput di perdesaan, kondisi identitas berlapis kerap termanifestasi pada kemiskinan struktural, pendidikan rendah, stigma sosial, serta keterbatasan akses informasi dan kebijakan publik.

Kondisi ini tidak hanya memperluas kerentanan, tetapi juga mempengaruhi legitimasi dan partisipasi dalam kepemimpinan lokal. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pengalaman identitas berlapis membentuk dinamika kepemimpinan perempuan serta bagaimana strategi pemberdayaan kolektif dapat menjadi ruang transformasi sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kompleksitas identitas perempuan.

Untuk itu peneliti menemukan kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis kepemimpinan perempuan akar rumput yang menempatkan **perlawanan terhadap stigmatisasi gender yang berlapis sebagai bagian dari dinamika kepemimpinan itu sendiri**, bukan sekadar sebagai konteks sosial. Penelitian ini lebih menekankan **proses pembentukan**

kepemimpinan perempuan melalui pengalaman hidup, negosiasi relasi kuasa, dan praktik resistensi sehari-hari atas kerentanan berlapis, sehingga memperkuat pentingnya pengakuan kepemimpinan perempuan akar rumput secara sosial dan politik di tingkat lokal. Secara tidak langsung, penelitian ini berkontribusi terhadap model kepemimpinan perempuan di Indonesia yang lebih banyak memberikan pengakuan pada bentuk kepemimpinan yang formal dan maskulin. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti memilih judul dalam penelitian ini **Dinamika Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput dan Perlawanan Stigmanisasi Gender**.

I.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini diharapkan mampu menemukan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan. Merujuk pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian dirumuskan ada 3 masalah yang ditemukan oleh peneliti. Rumusan - rumusan masalah telah disesuaikan dengan topik kepemimpinan perempuan akar rumput yang telah melakukan perlawanan terhadap stigmanisasi gender sehingga mereka mampu mengupayakan adanya pengakuan sosial dan politik.

Adapun tiga (3) rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Bagaimana bentuk dan dinamika kepemimpinan perempuan akar rumput yang berkembang di Sekolah Perempuan dalam konteks kerentanan berlapis dan stigmanisasi gender?**
2. **Bagaimana proses pemberdayaan yang berlangsung di Sekolah Perempuan berkontribusi terhadap penguatan agensi dan praktik kepemimpinan perempuan akar rumput?**
3. **Bagaimana pengalaman kepemimpinan perempuan akar rumput di Sekolah Perempuan berhubungan dengan upaya memperoleh pengakuan sosial dan politik dalam struktur sosial yang ada?**

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika kepemimpinan perempuan akar rumput yang berkembang di Sekolah Perempuan, proses pemberdayaan yang dialami oleh perempuan anggota Sekolah Perempuan, serta pengalaman mereka dalam menghadapi stigmanisasi gender dan mengupayakan pengakuan sosial dan politik dalam konteks kerentanan berlapis.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepemimpinan perempuan akar rumput dengan perspektif gender, interseksionalitas dan konsep pengakuan (*recognition*). Temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis kritis mengenai

relasi antara pemberdayaan, kepemimpinan, dan perlawanan terhadap stigmanisasi gender dalam studi feminis dan sosiologi pembangunan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil, pendamping komunitas, dan lembaga pendidikan nonformal dalam merancang strategi pemberdayaan perempuan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan pengalaman stigmatisasi perempuan akar rumput berupa pengalaman pemberdayaan kolektif di tingkat komunitas.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih inklusif dan responsif gender, khususnya dalam mengakui peran dan kepemimpinan perempuan akar rumput. Temuan penelitian ini dapat mendukung upaya penguatan pengakuan sosial dan politik terhadap perempuan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas seperti Sekolah Perempuan.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan wilayah Sekolah Perempuan Gresik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang berada di sebelah barat laut Kota Surabaya, dengan wilayah administratif yang mencakup daratan utama dan Pulau Bawean, serta pesisir utara yang cukup panjang. Luas wilayahnya sekitar 1.191,26 km² dan terbagi dalam 18 kecamatan dengan struktur desa/kelurahan yang beragam, mencerminkan kombinasi kawasan pesisir, agraris, dan peri-urban.

Menurut estimasi resmi Badan Pusat Statistik per pertengahan 2024, jumlah penduduk Kabupaten Gresik mencapai sekitar 1,33 juta jiwa, terdiri dari sekitar 667.540 laki-laki dan 659.957 perempuan, sehingga komposisi gendernya hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Proporsi populasi usia produktif (15–59 tahun) mendominasi sekitar dua pertiga dari total penduduk, menjadikan Gresik salah satu kabupaten dengan dinamika demografis yang signifikan di kawasan Jawa Timur. Serta menjadi kawasan industri yang cukup besar dan diperhitungkan dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, sehingga banyak sekali proyek berskala nasional dan perusahaan-perusahaan modal asing yang memilih Gresik sebagai pusat produksinya.

Secara khusus wilayah penelitian ini ada Kecamatan Wringinanom, yang di Kabupaten Gresik merupakan wilayah selatan yang strategis berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto, dengan luas sekitar 62,62 km² dan jumlah penduduk lebih dari 183 ribu jiwa tersebar di 16 desa. Masyarakatnya umumnya hidup dalam struktur sosial budaya yang kuat dan komunal, dengan mayoritas beragama Islam serta tradisi lokal yang hidup dalam kehidupan keseharian masyarakat desa.

Secara ekonomi, Wringinanom masih berkembang dengan basis agraris, di mana pertanian menjadi sektor penting sekaligus berdampingan dengan aktivitas industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memberikan peluang pendapatan alternatif bagi warga setempat. Di samping itu, terdapat kelompok masyarakat rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas yang tercatat sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang membutuhkan dukungan ekonomi dan pembinaan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi lokal. Masyarakat Wringinanom masih banyak yang melakukan tradisi berbasis adat istiadat Jawa, agak berbeda dengan masyarakat Gresik di wilayah utara yang sangat kental dengan tradisi pesantren dan Islam yang religius sesuai dengan keberadaan 2 wali yang dimakamkan di Gresik wilayah utara.



Gambar 1. Peta Satelit Kabupaten Gresik

Sebagai pertimbangan pula, pemilihan lokasi ini juga merujuk pada tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik. Adapun tingkat kemiskinan di Gresik terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, di mana persentase penduduk miskin turun dari sekitar 12,42 % pada awal periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini menjadi sekitar 10,32 % pada tahun 2024, setara dengan sekitar 142,390 jiwa yang masih berada di bawah garis kemiskinan dalam satu tahun terakhir.

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, tren ini menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, meskipun masih terdapat kelompok masyarakat di berbagai kecamatan yang menghadapi kerentanan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan, kepulauan seperti Pulau Bawean atau kecamatan yang memiliki keterbatasan akses terhadap peluang kerja formal dan fasilitas sosial.

Tabel 1. Perkiraan Persentase Kemiskinan (%) Per Kecamatan

No	Kecamatan	Perkiraan Persentase Kemiskinan (%)
1.	Tambak	11,7 %
2.	Sangkapura	10,0 %
3.	Gresik (kota)	8,5 %
4.	Driyorejo	9,5 %
5.	Kebomas	8,7 %
6.	Menganti	9,8 %
7.	Bungah	11,9 %
8.	Cerme	11,2 %
9.	Manyar	10,5 %
10.	Sidayu	12,9 %
11.	Kedamean	10,8 %
12.	Ujungpangkah	13,2 %
13.	Wringinanom	12,5 %
14.	Duduksampeyan	11,8 %
15.	Benjeng	11,5 %
16.	Dukun	12,0 %
17.	Balongpanggung	11,5 %

Sumber. Data Statistik Gresik Dalam Angka

Tabel diatas adalah ilustratif tentang persentase kemiskinan di Kabupaten Gresik berdasarkan kecamatan, menggunakan estimasi data BPS Kabupaten Gresik dan sumber-sumber publik yang tersedia. Angka kemiskinan diatas adalah berdasarkan tren umum wilayah per kecamatan di Gresik karena publikasi resmi BPS saat ini hanya menampilkan angka kabupaten secara agregat sekitar 10,32 % - 9,95 % tanpa ada rincian per kecamatan.

2.2. Bahan Dan Alat

2.2.1 Instrumen Penelitian (*Human Instrument*)

Pada bagian ini peneliti menjadi bagian dari perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data hingga akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian sehingga peneliti adalah menjadi orang yang menjadi pusat dari keseluruhan proses penelitian. Menurut Guba dan Lincoln (1981:128-150), ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen dalam penelitian yang mencakup kualitas yang diharapkan dan peningkatan manusia sebagai instrumen. Antara lain ciri-ciri umum tersebut adalah dari segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengihtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim atau *idoosinkratik*.

Sedangkan peneliti memaknai terkait kualitas yang diharapkan sebagai sesuatu yang menjadi keharusan bagi peneliti untuk dapat bertanggungjawab dalam melakukan wawancara secara lancar dan dapat menyediakan lingkungan yang nyaman bagi informan. Untuk itu kualitas

yang dimiliki oleh peneliti antara lain sabar, toleran, empati, terbuka, jujur, mencintai pekerjaan selama wawancara, bahagia, menjadi pendengar yang baik dan hal-hal sejenis yang mampu mendukung proses dapat dilakukan dengan maksimal.

Adapun peningkatan kemampuan peneliti adalah peneliti hendaknya mempersiapkan diri dengan melatih diri dengan mempelajari situasi baru, pengalamannya dan kemudian mencatatnya apa yang diperoleh dengan baik, begitu pula dengan kemampuan untuk melakukan wawancara bersamaan dengan melakukan pencatatan dari hasil pembicaraannya.

2.2.2. Sumber Dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Oleh sebab itu jenis data yang dimaksud dikelompokkan menjadi kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Hasil dari pengamatan yang dimungkinkan ketika peneliti dapat terlibat dalam suatu aksi yang sedang dilakukan pada saat penelitian. Dan juga audiovisual yang dapat dikumpulkan melalui pengamatan dari media-media online dan dokumentasi yang diproduksi oleh para pihak utama.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau berperan serta menghasilkan gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya, dari unsur-unsur ini yang dominan akan tergantung dengan konteks dan situasinya. Sehingga dalam penelitian ini, jika peneliti ada pada situasi aktifitas diluar yang sangat ramai maka yang akan diutamakan adalah sumber data dari kegiatan melihat dan mendengarkan, sedangkan jika peneliti dalam situasi melakukan wawancara mendalam maka sumber data yang akan diutamakan adalah tulisan dan rekaman dari jawaban-jawaban informan.

Meskipun sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, penelitian ini juga menambahkan sumber data tertulis yang dapat mendukung dan memperkuat sumber-sumber informasi yang relevan. Sumber data tertulis ini diperoleh dari sumber buku, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

2.2.3 Teknik Pengambilan Sampel/Informan

Teknik pengambilan sampel pada teori dasar ini, peneliti akan memilih sampel fokus pada informan yang dapat memberikan informasi kaya dan relevan untuk membangun pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Adapun teknik sampling yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sampling Purposive (*Purposive Sampling*) yaitu teknik ini memungkinkan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut berdasarkan karakteristik informan yang diperkirakan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan penelitian.
2. Sampling Maksimal Variasi (*Maximum Variation Sampling*), merupakan teknik ini memilih informan yang memiliki variasi karakteristik yang relevan dengan penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Untuk memilih sampling ini maka informan diatas juga akan

mempertimbangkan dari unsur jenis kelamin, usia, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan formal dan relasi terhadap Sekolah Perempuan..

2.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data (Miles dan Hubberman,1994) dalam penelitian studi kasus mempertimbangkan beberapa hal penting yaitu beragamnya individu yang merespon aksi atau berpartisipasi pada proses di seputar fenomena sentral, menemukan letak sampel yang homogen, perlunya wawancara dengan 10 atau lebih berdasarkan identifikasi jenis informan dari 4 Sekolah Perempuan yang telah disampaikan diatas, protokol wawancara/memoing (perekaman informasi), persoalan wawancara (logistik,keterbukaan), bagaimana informasi disimpan dalam bentuk transkrip atau file komputer:

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam yaitu melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, seperti anggota organisasi perempuan, masyarakat umum, tokoh masyarakat, pembuat kebijakan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. [ertanyaan wawancara akan disusun bersifat terbuka agar dapat menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka tentang stigma negatif yang dihadapi organisasi perempuan akar rumput.
2. Observasi dengan mengamati secara langsung kegiatan organisasi perempuan akar rumput untuk memahami dinamika internal dan interaksi mereka dengan lingkungan sosial.
3. Analisis dokumen dengan melakukan analisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan, artikel media, kebijakan pemerintah dan literatur terkait.

2.2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada studi kasus ini bertujuan untuk menemukan pola, tema, dan makna mendalam dari data yang telah dikumpulkan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana stigma mempengaruhi organisasi perempuan akar rumput, strategi apa yang mereka gunakan untuk menghadapi stigma dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan strategi tersebut. Menurut Janice McDrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mencatat data lapangan, membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada didalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan model yang ditemukan
4. Melakukan koding
 - Koding melalui koding terbuka, peneliti membentuk kategori informasi tentang fenomena yang sedang diteliti yaitu terkait fenomena perubahan, organisasi

akar rumput yang memungkinkan memiliki dimensi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dalam penelitian ini dapat dengan mengidentifikasi kata kunci, frase, atau konsep awal dari data yang terkumpul. Misalnya kata-kata seperti organisasi “tidak jelas”, “radikal”, “tidak profesional”, “perempuan liar”, “didanai asing” dapat menjadi kode awal yang terkait dengan stigma.

- Koding aksial/aksen yaitu kelanjutan dari tahap koding terbuka, peneliti menyajikan diagram logika yang mengidentifikasi fenomena sentral (organisasi perempuan akar rumput) , mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan strategi yaitu aksi atau interaksi dihasilkan dari fenomena sentral , identifikasi tantangan sebagai bagian dari kondisi yang mengganggu, serta menggambarkan konsekuensi atau hasil capaian dari strategi. Misalnya pada penelitian ini kode-kode seperti “radikal” dan “tidak profesional” dapat dikelompokkan ke dalam kategori “persepsi negatif tentang tujuan organisasi perempuan akar rumput.
- Membuat kategori dengan menggabungkan kategori-kategori yang serupa menjadi kategori yang lebih abstrak, misalnya beberapa kategori dapat digabungkan menjadi kategori utama seperti “stigma agama” yang dikaitkan dengan Sekolah Perempuan mengajari perempuan untuk melawan suami sehingga perempuan berani mengajukan gugatan cerai. Hal ini menurut pemahaman agama sebagian masyarakat di perdesaan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menggugat cerai suami karena dianggap sudah melawan imam keluarga.
- Koding selektif peneliti akan menuliskan alur cerita yang menghubungkan beberapa kategorisasi, atau proposisi atau hipotesa dapat ditentukan dengan menyatakan hubungan yang diprediksi. Tahapan ini dapat membangun teori dengan mengembangkan teori yang menjelaskan hubungan antara kategori-kategori yang telah diidentifikasi, misalnya teori yang dapat muncul adalah “stigma negatif terhadap organisasi perempuan akar rumput dipengaruhi oleh konstruksi sosial gender, kekuasaan politik, dan ketidaksetaraan ekonomi”.

Madison (2005) mengemukakan kebutuhan untuk menciptakan sudut pandang-pendirian yang menandakan kerangka penafsiran (misalnya kritis, feminis) yang dapat digunakan dalam studi kasus ini.

2.2.6. Uji Keabsahan Data

Maksud dari keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi komponen sebagai berikut yaitu:

1. Mendemostrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal tersebut dapat diterapkan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan (credibility) untuk mencapai tingkat kepercayaan hasil dan menunjukkan hasil-hasil penemuan dengan cara pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kriteria keteralihan dilakukan oleh peneliti untuk mencari

dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks melalui data deskriptif. Yang ketiga adalah kriteria kebergantungan, yaitu dengan memperhitungkan keleluasan dari sekedar reliabilitas saja namun faktor-faktor lainnya yang mempunyai keterhubungan. Dan kriteria keabsahan yang keempat adalah kepastian untuk menentukan apakah subyektifitas dari setiap pendapat perorangan dapat dinyatakan sebagai obyektifitas melalui persetujuan terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

Untuk itu dalam penelitian ini, akan menggunakan beberapa teknik menguji keabsahan data antara lain:

1. Triangulasi yaitu membandingkan hasil wawancara dengan pengurus/anggota organisasi dengan hasil observasi kegiatan organisasi
2. Angka pengecekan yaitu menunjukkan hasil analisis kepada beberapa informan kunci untuk mendapatkan umpan balik.
3. Observasi partisipatif dengan mengamati langsung kegiatan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang fenomena yang terjadi.

Berkaitan dengan tujuan penelitian maka penting diperhatikan hal-hal berikut ini:

- Peneliti harus memiliki sensitivitas terhadap isu gender sebagai dan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu gender dan keberpihakan terhadap pengalaman perempuan terutama perempuan – perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan mengalami kerentanan yang berlapis.
- Kerjasama dengan organisasi perempuan untuk mendapatkan dukungan dan masukan dalam proses penelitian.
- Etika penelitian untuk menjaga identitas informan dan meminimalisir dampak negatif peneliti terhadap informan.

2.3. Metode Penelitian

Peneliti memilih penelitian kualitatif dengan maksud untuk mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan memperhitungkan konteks yang relevan, dalam hal ini adalah tentang dinamika kepemimpinan akar rumput dan bagaimana perlawanan stigma negatif terhadap Sekolah Perempuan Gresik ketika mendorong penguatan kepemimpinan perempuan yang di komunitas perempuan perdesaan, sehingga dapat memahami fenomena sosial melalui gambaran yang holistik dan memperbanyak pemahaman yang mendalam.

Adapun metodologi kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus yang menekankan upaya peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk misalnya pengamatan, wawancara, dokumen dan berbagai laporan, adapun laporan dalam bentuk deskripsi kasus.

2.4. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai September 2025 di Desa Kesambenkulon, Mondoluku, Sooko dan Sumbergede. Lokasi ini dipilih karena memiliki

karakteristik sosial yang beragam serta wilayah Sekolah Perempuan Gresik sebagai strategi pemberdayaan perempuan di pedesaan. Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, peneliti melakukan observasi awal ke lokasi untuk menjajaki konteks sosial serta mengidentifikasi potensi informan kunci. Selama proses dilapangan, peneliti melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat lokal, pengurus Sekolah Perempuan, Anggota Sekolah Perempuan dan pejabat di pemerintah kabupaten.

Pengumpulan data dilakukan selama bulan Maret hingga September melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk melengkapi data wawancara dan mempertajam perspektif dan analisis hasil penelitian. Adapun untuk pelaksanaan wawancara dilakukan secara berjenjang dimulai dari informan yang ada di Sekolah Perempuan kemudian ke pemerintah desa dan kabupaten.

Analisis data dilakukan pada bulan September – Oktober 2025 dengan diawali mengolah data hasil wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus serta data-data primer. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dari data sekunder yang telah diperoleh dari berbagai sumber, misalnya berupa data statistik yang harus diolah lebih dulu.

2.5. Parameter Pengamatan

Pada penelitian ini, parameter yang ditentukan disesuaikan dengan topik pengamatan dan rumusan masalah, sehingga meliputi ada 3 sub topik yang menjadi parameter nya , yaitu:

1. Dinamika Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput yang dipengaruhi oleh konstruksi gender dan stigmatisasi gender yang berlapis.
2. Strategi pemberdayaan kolektif yang dilakukan oleh Sekolah Perempuan
3. Strategi para perempuan akar rumput untuk mendapatkan pengakuan sosial dan politik

2.6. Kerangka Berpikir

Gambar 2. Kerangka Berpikir



